

KATALOG : 1301001.7315

**INDIKATOR**

**SOSIAL EKONOMI  
MAKRO**

**KABUPATEN PINRANG  
2017**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG**

**INDIKATOR**

**SOSIAL EKONOMI  
MAKRO**

**KABUPATEN PINRANG**

**2017**



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG

# Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Pinrang 2017

Nomor Publikasi :  
Katalog BPS : 1301001.7315  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : viii + 68 halaman

Naskah : Sulthoni Syahid Sugito, S.ST

Gambar Kulit : Sulthoni Syahid Sugito, S.ST

@ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

*"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau mengganggakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang."*

# Kata Pengantar

Pembuatan publikasi ini didasarkan akan semakin meningkatnya kesadaran pengguna data di Kabupaten Pinrang akan data yang bersifat universal/umum, update dan strategis berkaitan tentang data sosial ekonomi di Kabupaten Pinrang.

Data yang dicakup dalam publikasi ini antara lain kependudukan, tenaga kerja, PDRB, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), produksi berbagai jenis tanaman pangan serta data kemiskinan.

Akhirnya semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk seluruh konsumen data. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam terciptanya publikasi ini. Kritik dan saran sangat ditunggu untuk perbaikan publikasi-publikasi berikutnya.

Pinrang, 4 November 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Pinrang

**Muhammad Asri Lantong**  
NIP. 19661121 199301 1 001

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	iii
	iv <b>Daftar Isi</b>
<b>Daftar Tabel</b>	v
	vii <b>Daftar Grafik</b>
<b>Penjelasan Teknis</b>	1
	8 <b>Bab I Penduduk &amp; Tenaga Kerja</b>
<b>Bab II PDRB &amp; Pertumbuhan Ekonomi</b>	21
	37 <b>Bab III Indeks Pembangunan Manusia</b>
<b>Bab IV Produksi Tanaman Pangan</b>	52
	62 <b>Bab V Kemiskinan</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	67

# Daftar Tabel

No Tabel	Nama Tabel	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2016	8
1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2016	9
1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2013-2016 (Jiwa)	11
1.4	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2015	14
1.5	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013-2015	15
1.6	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013-2015	16
1.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2011-2015	19
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011-2015	20
2.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	26
2.2	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2016**)	28
2.3	PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Tahun 2016**)	29
2.4	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2016**)	30
2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2012-2016 (Persen)	32
2.6	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	33
2.7	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)	34

<b>No Tabel</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Hal</b>
2.8	PDRB Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2015-2016 (miliar rupiah)	35
2.9	Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2016 (Persen)	36
3.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang, 2011-2016	40
3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2012-2015	45
3.3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 & 2016	46
3.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015	48
3.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2015	50
4.1	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Padi Sawah + Ladang	55
4.2	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Jagung	56
4.3	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Kedelai	57
4.4	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Kacang Tanah	58
4.5	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Kacang Hijau	59
4.6	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Ubi Kayu	60
4.7	Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 & 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jenis Tanaman : Ubi Jalar	61
5.1	Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2016	63
5.2	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2016	65

# Daftar Gambar

No Gambar	Nama Gambar	Hal
1.1	Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif, Tahun 2016	9
1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2016	10
1.3	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2015	16
1.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2015	17
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2015	18
2.1	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)	27
2.2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Tahun 2012-2016	31
3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2016	43
4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Pinrang Tahun 2011 – 2016	53
5.1	Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2012-2016	64

# Penjelasan Teknis

## **Penduduk**

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

## **Produk Domestik Regional Bruto**

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## **Output**

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

## **Nilai Tambah**

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\text{NTB} = \text{Output} - \text{Input antara}$$

$$\text{NTB} = \text{nilai tambah bruto}$$

## **Biaya Antara**

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara.

## **Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*y on y*)**

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

**Sumber pertumbuhan (*source of growth*)** menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDRB.

## **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

### **Penduduk miskin**

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

### **Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponennya itu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

$$\text{GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

### **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)**

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

### **Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)**

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

### **Ukuran Kemiskinan**

- a. *Head Count Index* (HCI- $P_0$ ), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P<sub>2</sub>*) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

### **Usia Kerja**

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja.

### **Angkatan Kerja**

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

### **Bukan Angkatan Kerja**

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

### **Bekerja**

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

### **Pengangguran**

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:

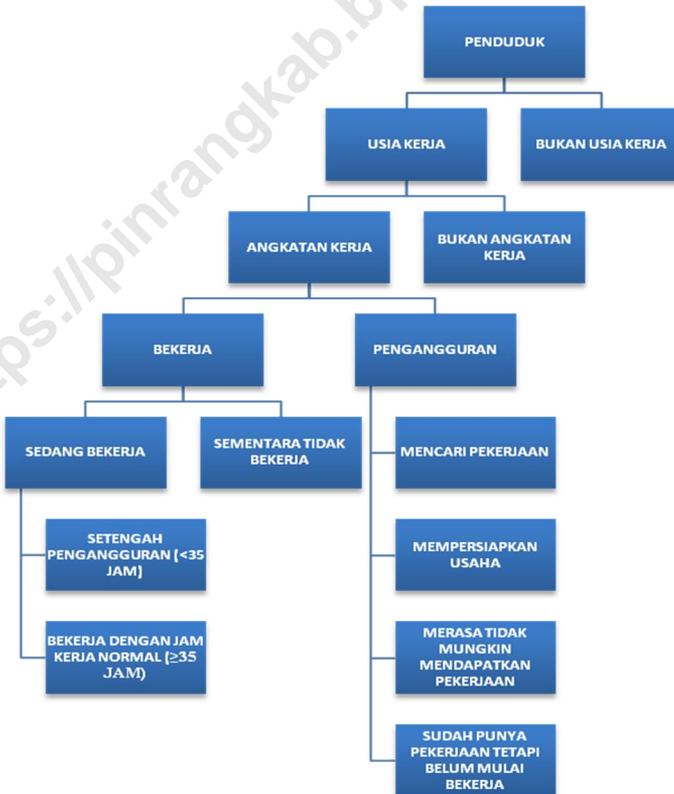
Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.

### Diagram Ketenagakerjaan



## Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar). Penghitungan produksi dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. Produksi *subround 1* (Januari–April) merupakan hasil perkalian luas panen *subround 1* dengan produktivitas *subround 1*.
2. Produksi *subround 2* (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian luas panen *subround 2* dengan produktivitas *subround 2*.
3. Produksi *subround 3* (September–Desember) merupakan hasil perkalian luas panen *subround 3* dengan produktivitas *subround 3*.
4. Produksi Januari–Desember merupakan penjumlahan produksi *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
5. Luas panen Januari–Desember merupakan penjumlahan luas panen *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
6. Produktivitas Januari–Desember adalah hasil produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks longevity, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM :

1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator : Angka Harapan Hidup,
2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator : Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator : Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Sangat Tinggi (IPM  $\geq$  80); (2) Tinggi (70  $\leq$  IPM < 80); (3) Sedang (60  $\leq$  IPM < 70); (4) Rendah (IPM < 60). Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_t} \times 100$$

### **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

### **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan

Jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS telah mengacu pada konsep dan definisi yang digunakan seragam oleh dunia internasional, sehingga angkanya dapat dipertanggungjawabkan dan diperbandingkan karena telah menggunakan konsep yang sama. Konsep yang digunakan tentang penduduk ialah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2016**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
0 - 4	18.674	17.930	36.604	104,15
5 - 9	18.815	18.012	36.827	104,46
10 - 14	18.652	18.035	36.687	103,42
15 - 19	16.576	15.868	32.444	104,46
20 - 24	13.749	13.930	27.679	98,70
25 - 29	13.138	13.822	26.960	95,05
30 - 34	11.954	13.099	25.053	91,26
35 - 39	11.715	13.286	25.001	88,18
40 - 44	12.587	13.544	26.131	92,93
45 - 49	11.289	12.644	23.933	89,28
50 - 54	8.935	10.497	19.432	85,12
55 - 59	7.162	8.399	15.561	85,27
60 - 64	5.702	6.860	12.562	83,12
65 - 69	4.287	5.484	9.771	78,17
70 - 74	2.998	4.145	7.143	72,33
75 +	3.088	4.719	7.807	65,44
<b>Jumlah</b>	<b>179.321</b>	<b>190.274</b>	<b>369.595</b>	<b>94,24</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal atau beban pembangunan. Kunci utama masalah jumlah penduduk yang besar adalah kualitasnya karena tanpa kualitas yang baik justru akan menjadi beban pembangunan. Dengan diperolehnya data penduduk Kabupaten Pinrang yang

akurat, maka dapat teridentifikasinya berbagai permasalahan kependudukan yang terjadi riil dimasyarakat, mulai dari masalah jumlah, persebaran hingga komposisi penduduk yang tidak merata antara kota dan desa.

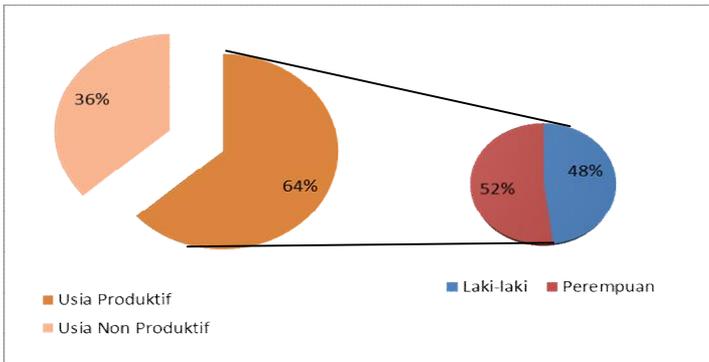
**Tabel 1.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2016**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	31,31	28,37	29,79
15-64	62,91	64,09	63,52
65+	5,78	7,54	6,69
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Populasi</b>	179.321	190.274	369.595

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS

Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2016 tercatat sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif yaitu 15-64 tahun yaitu sekitar 64 persen. Data menunjukkan juga bahwa pada tahun 2016 rasio ketergantungan (dependency ratio) atau lebih dikenal dengan angka beban ketergantungan mencapai 57 persen. Artinya dari 100 orang usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung 57 orang usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

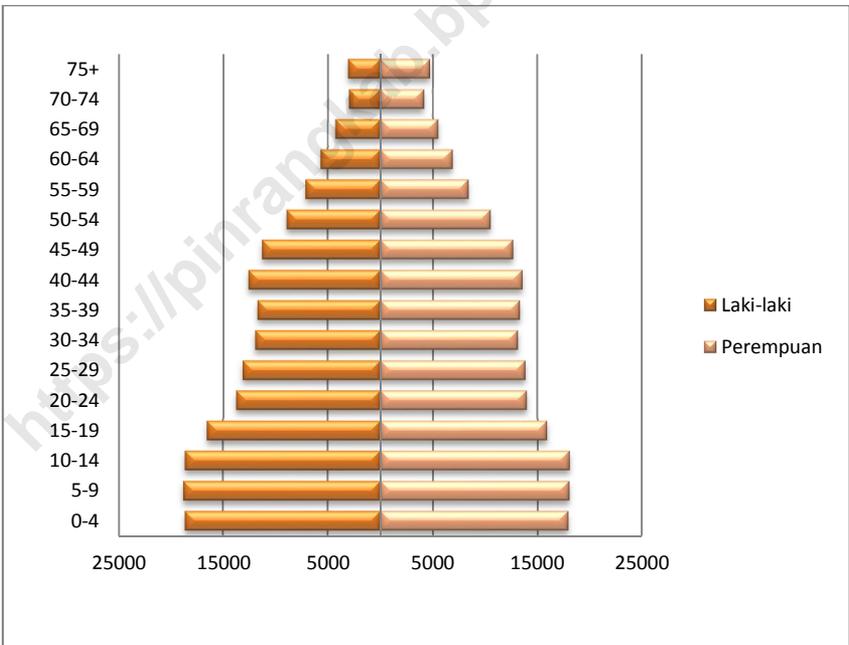
**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2016**



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS

Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk usia produktif perempuan (62,91 persen) lebih besar dibanding laki-laki yaitu mencapai 64,09 persen, begitu pula pada usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 dan 65+) laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Data ini bisa mencerminkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Pinrang mempunyai peranan dalam hal ketersediaan SDM di usia produktif, ini bisa menjadikan dasar pertimbangan otoritas pemangku kebijakan daerah untuk lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan serta program-program membangun yang bisa mengoptimalkan ketersediaan SDM penduduk perempuan.

**Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2016**



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS

Melihat bentuk piramida penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2016, cenderung mirip jenis piramida muda (ekspansif) yang biasanya berada di negara-negara negara berkembang. Bentuk piramida ini ditandai dengan suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang

rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Adapapun ciri khusus dari jenis piramida ini antara lain:

- Jumlah penduduk usia muda (0–19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
- Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
- Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India.

Tabel dibawah ini menampilkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang hasil proyeksi penduduk di masing-masing kecamatan.

**Tab 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2013-2016 (Jiwa)**

Kecamatan	2013	2014	2015	2016
Suppa	31.214	31.454	31.687	31.929
Mattiro Sompe	27.709	27.922	28.126	28.339
Lanrisang	17.258	17.390	17.518	17.651
Mattiro Bulu	27.422	27.635	27.839	28.053
Watang Sawitto	54.307	54.734	55.144	55.571
Paleteang	39.194	39.502	39.799	40.107
Tiroang	21.614	21.781	21.943	22.112
Patampanua	17.567	32.404	32.645	32.894
Cempa	32.158	17.703	17.833	17.970
Duampanua	44.422	44.764	45.096	45.438
Batulappa	9.805	9.880	9.953	10.027
Lembang	38.623	38.918	39.206	39.504
<b>Pinrang</b>	<b>361.293</b>	<b>364.087</b>	<b>366.789</b>	<b>369.595</b>
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>8.342.047</b>	<b>8.432.163</b>	<b>8.520.304</b>	<b>8.606.375</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS

Para pengguna data kependudukan, khususnya para perencana, dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus Penduduk (SP) pada tahun-tahun yang berakhir dengan angka 0 (nol) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang berakhir dengan angka 5 (lima). Untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang ideal maka seharusnya membutuhkan pendataan lengkap yakni sensus penduduk secara periodik tahunan. Tetapi kegiatan sensus penduduk dewasa ini di Indonesia secara umum belum dapat dilakukan secara tahunan, ditambah Sumber data kependudukan lain yaitu registrasi penduduk masih belum sempurna cakupan pencatatannya sehingga datanya belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu mengacu amanat undang-undang tentang statistik maka pelaksanaannya hanya dilakukan 10 tahun sekali, BPS telah melaksanakannya mulai tahun 1970 hingga yang terakhir tahun 2010.

Suatu perencanaan yang berkaitan dengan rakyat pastilah harus ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan komposisinya menurut kelompok umur penduduk yang relevan. Oleh karena sensus yang dilaksanakan oleh BPS hanya setiap 10 tahun sekali, maka dilakukan proyeksi penduduk dengan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 menempati urutan keenam terbesar di Sulawesi Selatan. Tercatat jumlah penduduk sebesar 369.595 jiwa atau meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 366.789 jiwa (tahun 2015). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan proyeksi penduduk tidak melampaui 1,5 persen, bahkan kurun waktu 2013-2016 tercatat hanya dibawah 1,2 persen dan mengalami tren penurunan laju pertumbuhan penduduk hingga tahun 2020 yang akan mencapai 1 persen. Jika melihat persebaran jumlah penduduk terlihat bahwa penduduk Kabupaten Pinrang sebagian besar berada di ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto dengan 55.571 jiwa atau dengan persentase terbesar yang mencapai 15,04 persen. Keadaan ini tidak mengherankan dikarenakan Kecamatan Watang Sawitto merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Sedangkan Kecamatan Batulappa dengan jumlah penduduk terendah yang hanya 10.027 jiwa atau 2,71 persen.

### **Ketenagakerjaan**

Kebutuhan dasar selain sandang, pangan dan papan adalah pekerjaan. Status bekerja tidak hanya merupakan status sosial dimasyarakat tetapi jauh lebih dari itu merupakan ibadah dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan suatu daerah dalam hal penyerapan tenaga kerja sekaligus produktifitas tenaga kerja.

Perlu diakui pekerjaan adalah motor perekonomian, apabila perekonomian ini tidak mampu menyerap tenaga kerja maka akan menciptakan pengangguran dan akibatnya adalah akan timbul masalah-masalah sosial di masyarakat. Dikarenakan keterbatasan data dalam hal estimasi tingkat kabupaten/kota seluruh indonesia maka pada publikasi ini hanya akan ditampilkan data sampai tahun 2015.

**Tabel 1.4 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2015**

Kegiatan	2013	2014	2015
<b>Angkatan Kerja</b>	126.453	152.353	144.609
<b>Bekerja</b>	123.973	148.110	137.591
<b>(%)</b>	51,05	58,41	53,57
<b>Penganggur</b>	2.480	4.243	7.018
<b>(%)</b>	1,02	1,67	2,73
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	116.418	101.241	112.251
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>52,07</b>	<b>60,08</b>	<b>56,30</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>1,96</b>	<b>2,78</b>	<b>4,85</b>

Sumber : BPS Pinrang

Penduduk berusia 15 tahun keatas digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Menurut data Sakernas 2015 diketahui bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pinrang tahun 2015 sebesar 56,30 persen yang artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 56 diantaranya termasuk angkatan kerja dan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja tetapi mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

**Tabel 1.5 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013-2015**

Kegiatan	2013	2014	2015
Pertanian	63.389	70.669	73.754
Industri	6.792	6.472	10.612
Perdagangan	21.541	23.072	21.895
Jasa-Jasa	19.160	32.072	16.229
Lainnya	13.091	15.022	15.101
<b>Total</b>	<b>123.973</b>	<b>148.110</b>	<b>137.591</b>

Sumber : BPS Pinrang

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Lapangan pekerjaan utama adalah sektor pekerjaan yang paling banyak menghabiskan waktu dalam bekerja dan memperoleh pendapatan yang paling besar.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten besar di Sulawesi Selatan dan merupakan penyumbang share perekenomian terbesar pula. Potensi daerah yang terdapat di laut dan tanahnya yang relatif subur menyebabkan sektor pertanian cukup menonjol. Kabupaten Pinrang adalah salah satu andalan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil pertanian padi dan bahkan disebut sebagai lumbung padi dan perikanan terutama perikanan tangkap dan budidaya. Oleh sebab itu sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2015 di Kabupaten Pinrang banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 73.754 jiwa atau mencapai 53,60 persen diikuti sektor perdagangan sebesar 21.895 jiwa atau 15,91 persen dan terendah adalah sektor industri yang hanya sebesar 10.612 jiwa atau kurang dari delapan persen.

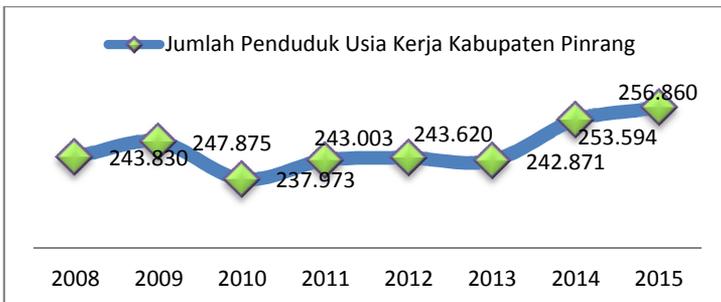
**Tabel 1.6 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013-2015**

Kegiatan	2013	2014	2015
Berusaha Sendiri	9.114	10.482	19.288
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	60.232	61.689	47.768
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	3.472	4.370	6.689
Pekerja/Buruh/Karyawan	28.142	35.673	35.660
Pekerja Bebas di Pertanian	1.101	1.407	850
Pekerja Bebas di Non Pertanian	3.667	1.695	2.026
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	18.245	32.794	25.310
<b>Total</b>	<b>123.973</b>	<b>148.110</b>	<b>137.591</b>

Sumber : BPS Pinrang

Berdasarkan status pekerjaan utama diketahui sebanyak 47.768 jiwa atau 34,72 persen penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar usaha di Kabupaten Pinrang lebih banyak bekerja dengan sistem kekeluargaan tanpa ada balas jasa dan ini juga ciri usaha mikro kecil (UMK). Untuk status pekerjaan utama paling sedikit adalah pekerja bebas di sektor pertanian yang hanya 850 jiwa atau kurang dari satu persen tepatnya 0,62 persen.

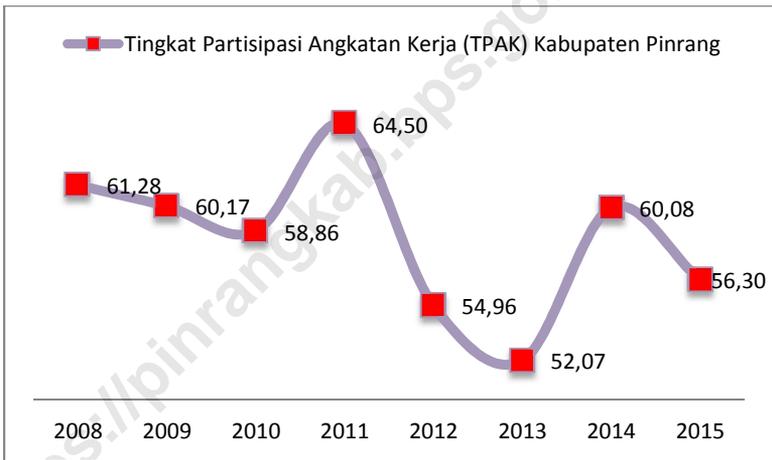
**Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang. Tahun 2008-2015**



Sumber : BPS Pinrang

Tren jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang menunjukkan terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun sempat terjadi penurunan setidaknya di tahun 2010 dan 2013. Penurunan ang terjadi pada tahun tersebut dikarenakan fenomena pergeseran sistem pertanian dengan lebih menggunakan teknologi terutama pada saat penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak lagi.

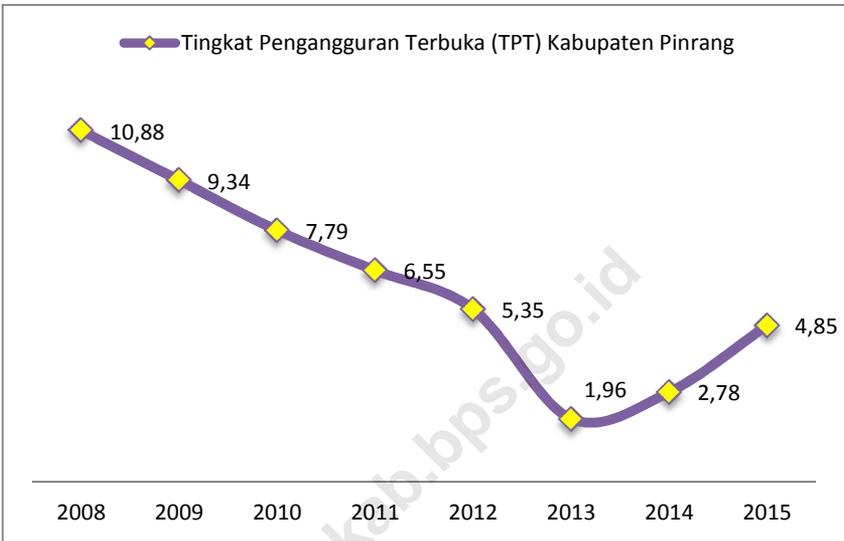
**Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang. Tahun 2008-2015**



Sumber : BPS Pinrang

Indikator yang dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kabupaten Pinrang mengalami kecenderungan penurunan walaupun sempat juga mengalami fluktuasi setidaknya pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2015 TPAK menunjukkan 56,30 atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60,08, kondisi ini mengindikasikan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di pinrang semakin menurun.

**Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2015**



Sumber : BPS Pinrang

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pinrang kurun waktu tahun 2008 – 2015 terjadi fluktuasi, pada tahun 2008 pernah mencapai 10,88 persen dan terus mengalami penurunan hingga setidaknya hingga tahun 2013 TPT berada pada titik terendah yaitu 1,96 persen. Kemudian tahun berikutnya mengalami kenaikan 2,78 persen di tahun 2014 bahkan pada tahun 2015 TPT Kabupaten Pinrang mencapai 4,85 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

Kecenderungan dalam 2 tahun terakhir TPT yang mengalami peningkatan perlu diantisipasi agar tidak terlalu tinggi karena ini akan berdampak pada sektor lainnya terutama ekonomi dan sosial masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif yang lebih menggunakan teknologi informasi kiranya perlu digencarkan dan ditingkatkan lagi, dikarenakan kemajuan era digital dewasa ini bisa menjadi peluang untuk membuka lapangan usaha baru.

**Gambar 1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2011-2015**

No.	Kabupaten /Kota	T P A K				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kep. Selayar	65,10	62,72	61,11	60,60	67,64
2	Bulukumba	64,22	68,42	62,25	65,02	65,35
3	Bantaeng	65,50	72,20	68,74	71,93	72,83
4	Jeneponto	64,53	66,98	61,96	61,74	60,78
5	Takalar	64,48	62,33	57,69	62,91	57,56
6	Gowa	65,60	62,08	64,17	66,32	58,33
7	Sinjai	65,08	73,06	70,34	68,78	65,28
8	Maros	64,93	64,31	60,98	62,96	65,04
9	Pangkep	64,99	57,57	54,41	57,60	59,25
10	Barru	64,23	56,75	53,43	50,39	52,63
11	Bone	64,02	64,84	63,30	63,94	64,94
12	Soppeng	63,44	62,05	57,22	57,59	56,29
13	Wajo	67,03	59,92	58,16	55,55	57,24
14	Sidrap	64,56	57,19	52,25	54,00	53,27
<b>15</b>	<b>Pinrang</b>	<b>64,50</b>	<b>54,96</b>	<b>52,07</b>	<b>60,08</b>	<b>56,30</b>
16	Enrekang	66,57	74,50	70,27	68,25	68,10
17	Luwu	65,28	59,67	58,69	62,50	60,78
18	Tana Toraja	67,11	76,25	70,55	80,31	82,79
19	Luwu Utara	65,95	65,63	62,02	66,68	65,81
20	Luwu Timur	68,33	67,32	65,01	67,21	69,75
21	Toraja Utara	63,49	68,29	65,25	69,80	67,56
22	Makassar	61,00	57,94	--	56,87	55,20
23	Pare-Pare	62,03	60,37	57,72	60,62	60,25
24	Palopo	63,12	59,64	58,13	58,05	54,27
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>64,32</b>	<b>62,82</b>	<b>60,49</b>	<b>62,04</b>	<b>60,94</b>

Sumber : BPS Pinrang

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2015 berada diposisi 20 dengan 56,30 persen, dan masih dibawah rata-rata TPAK Sulawesi Selatan yang mencapai 60,94 persen. Artinya keterlibatan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011-2015**

No.	Kabupaten /Kota	T P T				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kep, Selayar	4,68	3,25	4,62	2,15	0,90
2	Bulukumba	5,46	2,71	4,16	2,84	3,00
3	Bantaeng	5,54	7,02	6,44	2,42	4,07
4	Jeneponto	5,06	4,35	2,77	2,73	4,00
5	Takalar	5,54	6,21	2,73	2,75	4,04
6	Gowa	7,05	4,01	2,63	2,32	4,96
7	Sinjai	5,59	2,84	0,43	0,88	1,55
8	Maros	6,94	6,43	5,71	4,55	6,99
9	Pangkep	6,09	8,03	5,70	9,87	7,01
10	Barru	5,75	4,78	4,51	2,27	7,68
11	Bone	5,98	3,51	3,80	4,96	4,36
12	Soppeng	5,16	6,15	6,56	2,43	2,96
13	Wajo	7,45	3,13	3,72	4,92	5,39
14	Sidrap	4,78	6,99	7,62	6,20	6,97
15	<b>Pinrang</b>	6,55	5,35	1,96	2,78	4,85
16	Enrekang	6,66	3,05	1,61	1,44	1,33
17	Luwu	7,41	10,55	7,14	5,06	7,86
18	Tana Toraja	5,56	4,63	3,26	3,26	3,99
19	Luwu Utara	4,47	5,03	4,84	1,82	2,60
20	Luwu Timur	7,16	8,12	6,28	8,12	5,37
21	Toraja Utara	6,05	5,08	2,82	3,66	3,11
22	Makassar	8,41	9,97	-	10,94	12,02
23	Pare-Pare	7,97	4,21	4,86	7,06	8,48
24	Palopo	9,47	8,43	9,03	8,15	12,07
<b>Sulawesi Selatan</b>		6,56	5,87	5,10	5,08	5,95

Sumber : BPS Pinrang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang tahun 2015 berada diposisi 12, dengan 4,85 persen dan masih dibawah rata-rata TPT Sulawesi Selatan yang mencapai 5,95 persen. TPT tertinggi berada di Kota Palopo dengan 12,07 persen, Kota Makassar 8,48 persen dan urutan ketiga adalah Kota Parepare dengan 8,48 persen.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan beraneka ragam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dengan tepat dapat dicapai. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

### **Apa yang Dimaksud dengan PDRB?**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki

residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

### **Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?**

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

## **Apa yang Dimaksud SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

## **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

## **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;

- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>1</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan Work-in Progress (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR): Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM).
- Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi : Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

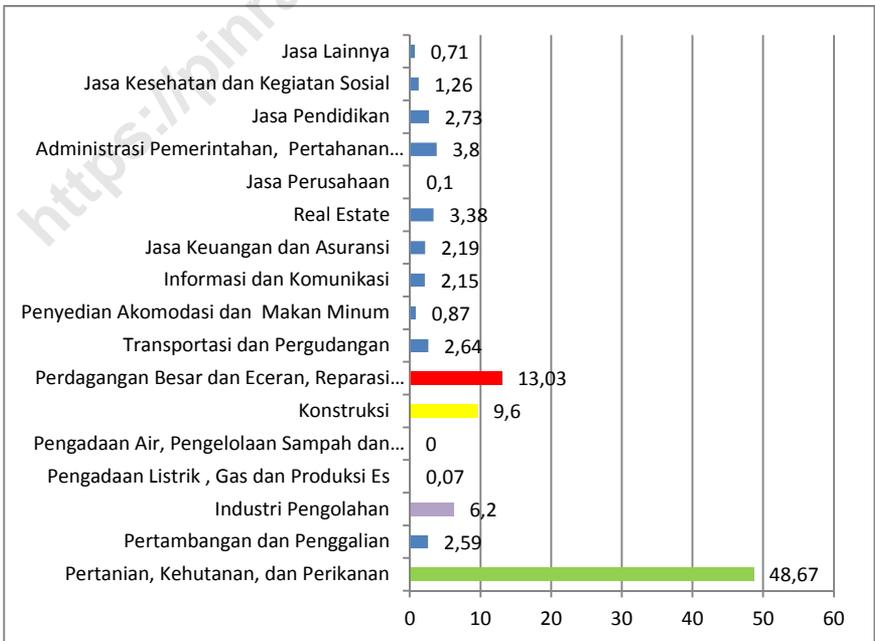
**Tabel 2.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB**

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen:	Harga Dasar:
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

### 3.1 Struktur Ekonomi

Melihat struktur perekonomian Kabupaten Pinrang berupa PDRB Atas dasar harga berlaku tahun 2016, sebagai daerah agraris Kabupaten Pinrang masih sangat mengandalkan sumber perekonomian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 48 sampai dengan 49 persen. Kemudian lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan 13 persen serta sektor konstruksi yang mencapai hampir 10 persen, merupakan penopang dan penggerak perekonomian utama disamping sektor-sektor lainnya. Selain itu industri pengolahan mempunyai kontribusi cukup besar mencapai 6 persen, itu artinya sektor ini cukup menjanjikan untuk terus dikembangkan dan Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya kontribusinya di bawah 10 persen.

**Gambar 2.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)**



Sumber : BPS Pinrang

**Table 2.2 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2016<sup>\*\*)</sup>**

	Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
		ADHB	ADHK		
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.199,22	4914,25	7,85	48,67
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	382,99	218,69	10,74	2,59
<b>C</b>	Industri Pengolahan	916,61	637,71	6,60	6,20
<b>D</b>	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	10,06	11,91	5,19	0,07
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,67	0,54	1,12	0,00
<b>F</b>	Konstruksi	1.420,04	965,31	5,92	9,60
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.927,87	1480,94	9,94	13,03
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	390,06	289,78	7,42	2,64
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,62	90,87	7,80	0,87
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	318,55	295,68	9,64	2,15
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	323,86	226,20	14,95	2,19
<b>L</b>	Real Estate	499,96	337,15	7,92	3,38
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	15,48	12,25	6,24	0,10
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	562,34	395,95	- 5,91	3,80
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	404,56	313,73	7,12	2,73
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186,34	135,92	7,81	1,26
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	104,82	77,28	9,75	0,71
	<b>PDRB</b>	<b>14.792,04</b>	<b>10.404,18</b>	<b>7,51</b>	<b>100,00</b>

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Catatan : PDRB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

**Gambar 2.3 PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Tahun 2016<sup>\*\*</sup>)**

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK		Laju Pertumbuhan
	2015*	2016**	2015*	2016**	y on y
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.410,39	7.199,22	4.556,39	4914,25	8,99
2 Pertambangan dan Penggalian	333,41	382,99	197,48	218,69	10,85
3 Industri Pengolahan	819,51	916,61	598,25	637,71	6,94
4 Pengadaan Listrik, Gas	9,33	10,06	11,32	11,91	0,98
5 Pengadaan Air	0,62	0,67	0,53	0,54	0,97
6 Konstruksi	1.264,05	1.420,04	911,36	965,31	6,43
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.631,38	1.927,87	1.347,05	1480,94	9,03
8 Transportasi dan Pergudangan	357,35	390,06	269,78	289,78	6,84
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,41	128,62	84,30	90,87	7,45
10 Informasi dan Komunikasi	282,95	318,55	269,68	295,68	8,16
11 Jasa Keuangan	274,34	323,86	196,78	226,20	7,94
12 Real Estate	439,91	499,96	312,41	337,15	7,86
13 Jasa Perusahaan	14,13	15,48	11,53	12,25	1,02
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	579,31	562,34	420,84	395,95	5,67
15 Jasa Pendidikan	356,94	404,56	292,88	313,73	6,56
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,82	186,34	126,08	135,92	7,89
17 Jasa lainnya	91,50	104,82	70,42	77,28	8,87
<b>PDRB Pinrang</b>	<b>13.142,34</b>	<b>14.792,04</b>	<b>9.677,08</b>	<b>10.404,18</b>	<b>7,51</b>
<b>PDRB Sulsel</b>	<b>340.264,4</b>	<b>379.209,5</b>	<b>250.758,3</b>	<b>269.338,5</b>	<b>7,41</b>

\*\*) Angka Sangat Sementara

Catatan : PDRB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

**Gambar 2.4 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2016<sup>\*\*</sup>**

Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
	ADHB	ADHK		
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.310,60	5.823,91	7,03	55,98
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	97,83	64,63	5,53	0,62
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.107,13	736,27	(1,50)	7,08
4 Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	5.326,37	3.743,98	8,14	35,90
5 Perubahan Inventori	123,21	84,14	(17,47)	0,81
6 Ekspor Barang dan Jasa	(173,10)	(39,76)	(69,17)	(0,38)
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-	-	-	-
<b>PDRB Kab. Pinrang</b>	<b>14.792,04</b>	<b>10.404,18</b>	<b>7,51</b>	<b>100,00</b>
<b>PDRB Sulsel</b>	<b>379.209,48</b>	<b>269.338,55</b>	<b>7,41</b>	

**\*\***) Angka Sangat Sementara

**Catatan :** PDRB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

Struktur perekonomian Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 tak lepas dari peranan masing-masing komponen pembentuknya. Data empiris PDRB menurut pengeluaran diantaranya menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

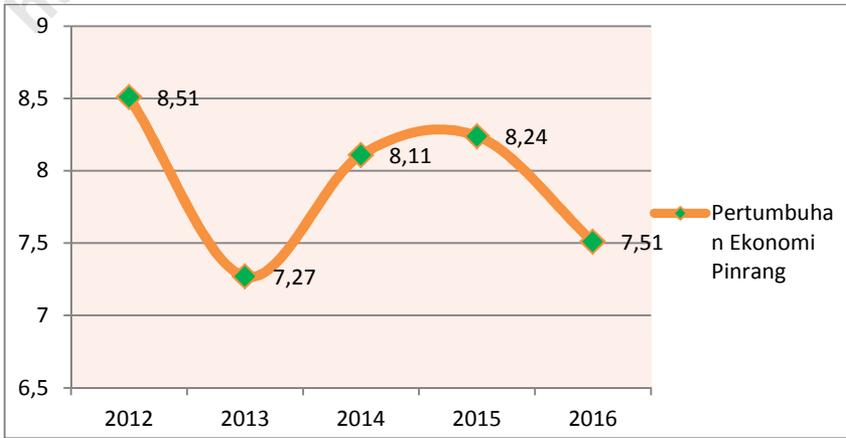
Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Terecat kontribusinya sebesar 55,98 persen dan laju pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sebesar 7,03 persen. Selanjutnya distribusi terbesar kedua adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) besarnya ialah 35,90 persen dan laju pertumbuhan dibandingkan tahun lalu ialah terbesar dibandingkan komponen lainya yang mencapai 7,08 persen. Pada sisi

yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Komponen terbesar ketiga ialah konsumsi akhir pemerintah dengan 7,08 persen dan komponen lainnya kurang dari satu persen saja.

### 3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 tahun berfluktuasi pada tahun 2012 tercatat pertumbuhan ekonomi 8,51 persen namun sempat mengalami penurunan pada tahun berikutnya yang hanya tumbuh 7,27 persen saja. Namun tahun-tahun setelahnya selalu mencatatkan hasil positif meskipun dengan kecepatan yang bervariasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Pinrang 8,11 persen, tahun 2015 8,24 persen. Terakhir tahun 2016 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat hanya 7,51 persen saja. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pembangunan kedepannya di Kabupaten Pinrang.

**Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Tahun 2012-2016**



Sumber : BPS Pinrang

Kabupaten Pinrang mencatatkan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen pada tahun 2016, masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Parepare yang hanya berada dibawah 7 persen. Untuk bisa melihat lebih rinci disajikan dalam tabel dibawah berikut ini.

**Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2012-2016 (Persen)**

No,	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan per Tahun				
		2012	2013	2014	2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
1	Kep. Selayar	7,88	8,18	9,01	8,81	7,35
2	Bulukumba	9,65	7,77	8,54	5,66	6,90
3	Bantaeng	9,67	9,00	8,34	6,64	7,39
4	Jeneponto	7,55	6,64	7,94	6,53	8,43
5	Takalar	6,58	8,80	9,77	8,41	9,61
6	Gowa	8,15	9,42	7,17	6,80	7,63
7	Sinjai	7,32	7,79	6,99	7,54	7,16
8	Maros	11,14	6,28	4,73	8,58	9,52
9	Pangkep	8,26	9,33	10,42	7,98	8,24
10	Barru	8,39	7,87	7,36	6,32	6,09
11	Bone	8,21	6,30	9,53	8,30	9,06
12	Soppeng	6,93	7,23	6,90	5,10	8,24
13	Wajo	6,50	6,92	9,68	7,05	4,98
14	Sidrap	8,93	6,93	7,87	7,92	9,00
<b>15</b>	<b>Pinrang</b>	<b>8,51</b>	<b>7,27</b>	<b>8,11</b>	<b>8,24</b>	<b>7,51</b>
16	Enrekang	7,30	5,84	6,00	6,90	7,64
17	Luwu	7,00	7,74	8,81	7,26	7,99
18	Tana Toraja	8,58	7,19	6,82	6,85	7,42
19	Luwu Utara	6,81	7,39	8,83	6,67	7,49
20	Luwu Timur	5,62	6,30	8,11	6,85	1,62
21	Toraja Utara	9,45	9,70	7,64	7,69	8,21
22	Makassar	9,64	8,55	7,40	7,44	7,99
23	Pare-Pare	8,80	7,95	6,33	6,28	6,87
24	Palopo	7,00	8,02	7,06	6,48	6,98

**\*) Angka Sementara**

**\*\*) Angka Sangat Sementara**

Catatan : PDRB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

PDRB Per kapita pada tahun 2016 terbesar berada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar 19,48 juta rupiah, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,22 juta rupiah dan terkecil ada di sektor pengadaan air yang nilainya nol dibawah dua digit dibelakang koma.

**Tabel 2.6 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)**

	Lapangan Usaha	PDRB Perkapita				
		2012	2013	2014	2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,73	13,07	15,10	17,48	19,48
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,57	0,75	0,91	1,04
<b>C</b>	Industri Pengolahan	1,50	1,70	1,97	2,23	2,48
<b>D</b>	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
<b>E</b>	Pengadaan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	Konstruksi	2,36	2,70	3,03	3,45	3,84
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,08	3,47	3,87	4,45	5,22
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	0,61	0,69	0,82	0,97	1,06
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,24	0,28	0,31	0,35
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	0,58	0,70	0,75	0,77	0,86
<b>K</b>	Jasa Keuangan	0,52	0,59	0,67	0,75	0,88
<b>L</b>	Real Estate	0,81	0,91	1,05	1,20	1,35
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,20	1,29	1,36	1,58	1,52
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	0,79	0,86	0,90	0,97	1,09
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,29	0,34	0,39	0,45	0,50
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28
	<b>PDRB Pinrang</b>	<b>24,39</b>	<b>27,38</b>	<b>31,22</b>	<b>35,83</b>	<b>40,02</b>
	<b>PDRB Sulawesi Selatan</b>	<b>27,67</b>	<b>31,03</b>	<b>35,34</b>	<b>39,94</b>	<b>44,06</b>

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Catatan : Angka ini adalah angka PDRB Seri 2010

Indikator PDRB Per kapita merupakan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016 PDRB perkapita yaitu 40,02 juta rupiah.

**Tabel 2.7 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)**

No,	Kabupaten /Kota	PDRB Perkapita					
		2011	2012	2013	2014	2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
1	Kep. Selayar	17,08	19,62	22,64	27,14	31,86	35,61
2	Bulukumba	13,30	15,53	17,75	20,54	23,31	26,27
3	Bantaeng	18,18	21,28	24,03	27,23	30,56	34,06
4	Jeneponto	11,83	13,54	15,01	17,42	19,56	22,02
5	Takalar	13,88	15,75	17,83	20,73	23,77	26,75
6	Gowa	12,31	13,74	15,39	16,98	19,03	21,08
7	Sinjai	18,68	21,13	23,85	27,42	31,57	34,68
8	Maros	26,54	31,79	36,07	40,11	45,99	52,18
9	Pangkep	32,22	37,51	43,39	49,86	57,12	63,11
10	Barru	17,40	19,97	22,64	26,03	28,87	31,81
11	Bone	17,70	20,33	22,79	26,90	31,34	35,36
12	Soppeng	19,05	21,15	23,95	27,35	30,26	35,07
13	Wajo	23,07	26,12	29,77	34,84	38,45	41,93
14	Sidrap	19,02	21,83	24,48	28,08	32,11	36,77
<b>15</b>	<b>Pinrang</b>	<b>21,25</b>	<b>24,39</b>	<b>27,38</b>	<b>31,22</b>	<b>35,83</b>	<b>40,02</b>
16	Enrekang	15,81	17,77	20,98	23,37	26,20	29,27
17	Luwu	17,43	19,67	22,34	25,98	29,59	33,78
18	Tana Toraja	12,54	14,38	16,28	18,79	21,43	23,83
19	Luwu Utara	16,95	18,89	21,32	25,30	28,73	32,06
20	Luwu Timur	55,28	59,47	63,35	70,63	69,71	67,62
21	Toraja Utara	13,53	16,06	19,02	22,46	26,07	30,06
22	Makassar	49,29	56,24	62,75	70,24	78,87	86,84
23	Pare-Pare	23,37	26,25	29,15	32,39	36,50	39,49
24	Palopo	21,81	23,57	26,00	28,80	31,68	34,18
<b>Sulawasei Selatan</b>		<b>24,31</b>	<b>27,67</b>	<b>31,03</b>	<b>35,34</b>	<b>39,94</b>	<b>44,06</b>

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Catatan : Angka ini adalah angka PDRB Seri 2010

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah besar dengan PDRB terbesar ke kedelapan di Propinsi Sulawesi Selatan. Keterbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.8 PDRB Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2015-2016 (miliar rupiah)**

No,	Kabupaten /Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
		2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>**)</sup>	2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
1	Kep. Selayar	4.148,07	4.685,98	2.723,95	2.924,26
2	Bulukumba	9.568,06	10.855,71	6.773,59	7.241,16
3	Bantaeng	5.604,33	6.283,89	4.072,58	4.373,65
4	Jeneponto	7.000,78	7.877,17	5.085,25	5.513,69
5	Takalar	6.820,89	7.755,77	4.930,88	5.404,58
6	Gowa	13.752,44	15.503,91	10.379,84	11.172,27
7	Sinjai	7.517,57	8.312,55	5.414,78	5.802,60
8	Maros	15.602,77	17.891,56	10.930,22	11.970,40
9	Pangkep	18.484,42	20.617,28	13.408,20	14.513,11
10	Barru	4.942,60	5.467,88	3.694,09	3.919,04
11	Bone	23.283,47	26.414,53	16.050,61	17.504,82
12	Soppeng	6.843,17	7.935,79	5.131,02	5.554,05
13	Wajo	15.118,52	16.540,50	11.069,65	11.620,82
14	Sidrap	9.304,93	10.772,99	6.597,66	7.191,28
<b>15</b>	<b>Pinrang</b>	<b>13.142,34</b>	<b>14.792,04</b>	<b>9.677,08</b>	<b>10.404,18</b>
16	Enrekang	5.240,38	5.901,55	3.622,71	3.899,61
17	Luwu	10.362,57	11.932,79	7.437,12	8.031,64
18	Tana Toraja	4.907,41	5.484,92	3.416,76	3.670,27
19	Luwu Utara	8.697,36	9.791,38	6.121,92	6.580,62
20	Luwu Timur	19.211,24	19.057,11	14.632,06	14.868,56
21	Toraja Utara	5.880,06	6.822,15	3.779,01	4.089,33
22	Makassar	114.309,18	127.623,17	88.750,16	95.836,98
23	Pare-Pare	5.061,82	5.544,66	3.842,88	4.106,87
24	Palopo	5.351,08	5.910,79	4.140,24	4.429,43

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Catatan : Angka ini adalah angka PDRB Seri 2010

Kabupaten Pinrang tercatat pada tahun 2010 mencatatkan *share* sebesar 3,84 persen dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 3,89 persen, ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Pinrang semakin maju. Namun secara peringkat tidak mengalami peningkatan.

**Tabel 2.9 Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2016 (Persen)**

No,	Kabupaten/Kota	Peranan/Share		Rank Share	
		2010	2016**)	2010	2016**)
1	Kep. Selayar	1,05	1,23	24	24
2	Bulukumba	2,76	2,86	10	10
3	Bantaeng	1,57	1,65	18	18
4	Jeneponto	2,07	2,07	15	15
5	Takalar	1,93	2,04	16	16
6	Gowa	4,15	4,08	7	7
7	Sinjai	2,20	2,19	13	13
8	Maros	4,26	4,71	6	5
9	Pangkep	5,04	5,43	4	3
10	Barru	1,49	1,44	21	23
11	Bone	6,44	6,96	3	3
12	Soppeng	2,16	2,09	14	14
13	Wajo	4,38	4,36	5	6
14	Sidrap	2,58	2,84	11	11
<b>15</b>	<b>Pinrang</b>	<b>3,84</b>	<b>3,89</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
16	Enrekang	1,52	1,55	20	20
17	Luwu	2,98	3,14	9	9
18	Tana Toraja	1,39	1,44	23	22
19	Luwu Utara	2,48	2,58	12	12
20	Luwu Timur	6,89	5,02	2	4
21	Toraja Utara	1,46	1,80	22	17
22	Makassar	34,10	33,60	1	1
23	Pare-Pare	1,55	1,46	19	21
24	Palopo	1,70	1,46	17	19
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Catatan : PDRB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

Setelah sebelumnya membahas tentang kependudukan, ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB, maka pada bab ini akan dibahas tentang sudut pandang yang berbeda dari segi konsep pembangunan manusia dari berbagai aspek. Sebagai daerah besar Kabupaten Pinrang tidak terlepas dalam upaya pembangunan namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya mensinergikan antara SDA yang melimpah dan SDM yang banyak.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan dibidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana, melainkan juga harus melibatkan aspek manusia didalamnya. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan hendaknya dibutuhkan masyarakat yang unggul dari segi SDM-nya.

Konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, nampaknya mulai dikesampingkan dikarenakan disparitas kota/desa sangat berpengaruh. Oleh karenanya sudut pandang pembangunan manusia dapat memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) kediskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Selama ini model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PDB dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia. Disisi lain 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' hanya melihat manusia sebagai penerima

dan bukan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam usaha meningkatkan kualitas manusia, melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan atau daya beli maupun aspek moralitas. Tidak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan manusia berkualitas. Oleh karena itu pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara maupun wilayah tertentu yang pembangunannya tidak hanya ditandai oleh tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi melainkan juga mencakup pula kualitas manusianya. Inilah yang akan menjadi tantangan semua pihak, bagaimana menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia.

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (long and healthy life), pengetahuan (knowledge) serta standar hidup layak (a decent standard of living). Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari

pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Dengan semakin berkembangnya teknik perhitungan IPM yang akan lebih mengakomodir kelemahan yang ada, maka pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tepatnya pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi IPM dan hasilnya pada tahun yang sama UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tercepat dalam peningkatan IPM. Tercatat Indonesia dalam kurun waktu 1970-2010 termasuk dalam World's Top Movers in HDI Improvement. IPM Indonesia tahun 2013 sebesar 68,5 (kategori menengah) dan menduduki peringkat 108 dari 187 negara.

Secara umum IPM memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah :

- Ukuran Keberhasilan  
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
- Target Pembangunan  
Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan.
- Dana Alokasi Umum

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Susenas Modul Konsumsi, data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kabupaten Pinrang yang merupakan daerah dengan salah satu dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang baik di Propinsi Sulawesi Selatan, menarik kiranya melihat aspek atau komponen-komponen pembentuk IPM.

**Tabek 3.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya  
Kabupaten Pinrang, 2011-2016**

Komponen	2011	2012	2013	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	67,95	68,00	68,03	68,43	68,55
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,27	12,52	13,16	13,17	13,18
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,33	7,43	7,45	7,47	7,48
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	10.514	10.605	10.680	10.791	10.899
<b>IPM</b>	<b>67,64</b>	<b>68,14</b>	<b>68,92</b>	<b>69,24</b>	<b>69,42</b>

Sumber : BPS Pinrang

### Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indeks Kesehatan dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

AHH dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan. Kurun waktu 2012-2017 AHH Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah telah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 AHH sebesar 68,55 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 diperkirakan akan bertahan hidup hingga 68 sampai 69 tahun lagi.

## Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP. Pada tahun 2017 RLS sebesar 7,48 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang bersekolah sampai dengan 7-8 tahun yang bisa diartikan sampai kelas 1-2 SMP. Karena semakin tinggi angka MYR maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Namun setidaknya kurun waktu 2012-2017 telah menunjukkan tren kearah positif, yang artinya berbagai program pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan RLS ini berjalan.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Pada tahun 2017 HLS sebesar 13,18 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang mengharapkan akan sekolah hingga tamat SMA dan menduduki perguruan tinggi walaupun tidak sampai tamat.

## Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul dan dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan Paritas Daya Beli menggunakan 96 komoditas yaitu 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

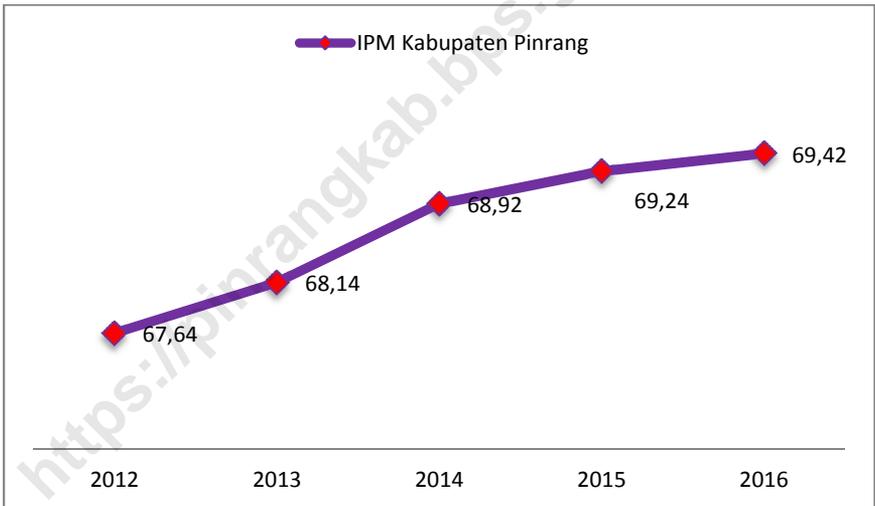
Komponen yang terakhir adalah daya beli di Kabupaten Pinrang sendiri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Paritas daya beli (PPP) sebesar 10.899 ribu rupiah atau berada diatas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 10.281 ribu rupiah. Yang artinya paritas daya beli penduduk di Kabupaten Pinrang menunjukkan daya beli cukup tinggi setidaknya diatas PPP Propinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini tidak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota-kota penyangga seperti Kota Pare-Pare maupun Kota Makasar. Akses yang mudah dan budaya secara umum suku-suku di Pinrang yang lebih konsumtif menyebabkan paritas daya beli tinggi.

Berdasarkan teknik penghitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya diperoleh IPM Kabupaten Pinrang tahun 2016 adalah sebesar 69,42 yang merupakan akumulasi dari angka harapan hidup 68,55 tahun, harapan lama sekolah penduduk sebesar 13,18 tahun, dan rata-rata lama sekolah 7,48 tahun, serta pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar 10.899 ribu rupiah. Jika mengaju pada skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi sangat tinggi ( $IPM > 80$ ), kategori tinggi ( $70 < IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 < IPM < 70$ ) dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ), maka terlihat bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 IPM Kabupaten Pinrang masih stagnan pada kategori

IPM sedang. Tumbuhnya berbagai pusat bisnis dan pertanian ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih baik, terbukti saat ini hampir mendekati 70 (kategori tinggi).

Berdasarkan data dan juga hasil perhitungan IPM tampaknya proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang sudah cukup baik. Meskipun demikian karena manusia selalu tumbuh dan berkembang yang selalu seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan kehidupan, maka masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

### 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang, Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Pinrang

Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa peringkat IPM tertinggi pada tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makasar, disusul oleh Kota Pare-Pare dan Kabupaten Palopo. Kabupaten Pinrang sendiri berada pada urutan yang baik yaitu peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota.

Data hasil perhitungan IPM yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang pada posisi yang relatif baik disebabkan beberapa komponen penyusun IPM ternyata memiliki angka diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Komponen penyusun IPM seperti harapan lama sekolah sebesar 13,18 tahun berada diatas HLS Provinsi Sulawesi Selatan yang 13,16 tahun. Kemudian untuk daya beli di Kabupaten Pinrang sendiri menunjukkan bahwa Paritas daya beli (PPP) sebesar 10.899 ribu rupiah atau berada diatas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 10.281 ribu rupiah.

Namun terdapat juga angka yang nilainya dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu angka harapan hidup Kabupaten Pinrang sebesar 68,55 tahun atau berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 69,82 tahun. Kemudian ratarata lama sekolah untuk Kabupaten Pinrang sebesar 7,48 tahun berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,75 tahun.

Angka harapan hidup yang masih dibawah rata-rata maka diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dapat lebih meningkatkan sarana dan dan prasarana bidang kesehatan dan diharapkan juga kedepannya masyarakat bisa sejahtera memiliki umur yang panjang dan sehat.

Kendati data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Pinrang sudah menunjukkan kearah yang positif bukan berarti pemerintah berpuas akan pencapaian tersebut. Harapan lama sekolah merupakan pemicu (booster) bagi peningkatan pembangunan manusia dibidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk lebih meningkatkan lagi sarana prasarana serta kualitas pendidikan agar dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan akhirnya mencapai pembangunan manusia yang baik di bidang pendidikan.

Peringkat tertinggi keenam dalam pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan yang pro rakyat yaitu dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama di bidang pendidikan serta sarana prasarana agar pertumbuhan ekonomi juga dinikmati masyarakat. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten

Pinrang semakin baik yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di kabupaten ini.

**Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2012-2016**

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Peringkat IPM 2016	Laju IPM 2015-2016 (%)
1	Kep. Selayar	62,87	63,16	63,66	64,32	64,95	21	0,97
2	Bulukumba	63,82	64,27	65,24	65,58	66,46	17	1,34
3	Bantaeng	63,99	64,88	65,77	66,20	66,59	16	0,60
4	Jeneponto	59,62	60,55	61,45	61,61	61,81	24	0,33
5	Takalar	61,66	62,58	63,53	64,07	64,96	21	1,38
6	Gowa	64,65	65,45	66,12	66,87	67,70	12	1,24
7	Sinjai	62,74	63,47	63,83	64,48	65,36	20	1,37
8	Maros	65,50	66,06	66,65	67,13	67,76	11	0,95
9	Pangkep	64,30	65,24	66,16	66,65	66,86	15	0,31
10	Barru	66,07	67,02	67,94	68,64	69,07	8	0,62
11	Bone	60,77	61,40	62,09	63,11	63,86	23	1,18
12	Soppeng	64,05	64,43	64,74	65,33	65,95	19	0,95
13	Wajo	64,88	65,79	66,49	66,90	67,52	13	0,93
14	Sidrap	66,19	67,15	68,14	69,00	69,42	7	0,57
<b>15</b>	<b>Pinrang</b>	<b>67,64</b>	<b>68,14</b>	<b>68,92</b>	<b>69,24</b>	<b>69,42</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>
16	Enrekang	67,74	68,39	69,37	70,03	70,79	5	1,09
17	Luwu	65,43	66,39	67,34	68,11	68,71	9	0,88
18	Tana Toraja	63,96	64,55	65,08	65,75	66,25	18	0,76
19	Luwu Utara	65,99	66,40	66,90	67,44	67,81	10	0,55
20	Luwu Timur	69,34	69,53	69,75	70,43	70,95	4	0,73
21	Toraja Utara	64,89	65,65	66,15	66,76	67,49	14	1,10
22	Makassar	78,47	78,98	79,35	79,94	80,53	1	0,74
23	Pare-Pare	74,67	75,10	75,66	76,31	76,48	2	0,22
24	Palopo	74,54	75,02	75,65	76,27	76,45	3	0,25
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>67,26</b>	<b>67,92</b>	<b>68,49</b>	<b>69,15</b>	<b>69,76</b>	<b>14</b>	<b>0,88</b>
<b>Nasional</b>		<b>67,09</b>	<b>67,70</b>	<b>68,31</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>		<b>0,91</b>

Sumber : BPS Pinrang

Tabel dibawah berikut untuk melihat keterbandingan masing-masing komponen IPM di seluruh wilayah kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan.

**Tabel 3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 & 2016**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Perkapita Dिसesuaikan (000 Rp PPP)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<b>Kep. Selayar</b>	67,70	67,76	12,29	12,44	7,16	7,17	7.793	8.123
<b>Bulukumba</b>	66,73	66,84	12,32	12,64	6,68	6,86	9.777	10.040
<b>Bantaeng</b>	69,77	69,84	11,67	11,88	6,16	6,17	10.467	10.596
<b>Jeneponto</b>	65,49	65,57	11,70	11,77	5,64	5,65	8.489	8.559
<b>Takalar</b>	66,20	66,29	11,61	12,00	6,57	6,64	9.423	9.759
<b>Gowa</b>	69,88	69,92	12,74	13,03	7,24	7,52	8.578	8.717
<b>Sinjai</b>	66,46	66,54	12,34	12,83	7,05	7,06	8.433	8.706
<b>Maros</b>	68,55	68,58	12,67	12,96	7,19	7,20	9.468	9.758
<b>Pangkep</b>	65,67	65,77	12,38	12,39	7,32	7,33	10.517	10.670
<b>Barru</b>	68,03	68,16	13,53	13,54	7,60	7,61	9.811	10.155
<b>Bone</b>	66,01	66,12	12,41	12,42	6,55	6,76	7.930	8.275
<b>Soppeng</b>	68,52	68,62	11,81	12,20	7,05	7,06	8.835	8.965
<b>Wajo</b>	66,23	66,38	13,07	13,08	6,37	6,38	11.047	11.681
<b>Sidrap</b>	68,57	68,69	12,88	12,89	7,32	7,33	11.004	11.368
<b>Pinrang</b>	<b>68,43</b>	<b>68,55</b>	<b>13,17</b>	<b>13,18</b>	<b>7,47</b>	<b>7,48</b>	<b>10.791</b>	<b>10.899</b>
<b>Enrekang</b>	70,31	70,34	13,30	13,65	8,05	8,06	9.818	10.188
<b>Luwu</b>	69,44	69,52	12,88	13,27	7,74	7,75	9.160	9.301
<b>Tana Toraja</b>	72,41	72,48	13,23	13,24	7,91	7,92	6.273	6.509
<b>Luwu Utara</b>	67,40	67,50	12,11	12,33	7,38	7,39	10.697	10.786
<b>Luwu Timur</b>	69,64	69,71	12,36	12,78	7,87	7,88	11.926	11.960
<b>Toraja Utara</b>	72,80	72,87	12,95	13,33	7,71	7,72	7.033	7.228
<b>Makassar</b>	71,47	71,49	14,76	14,80	10,77	11,07	15.669	16.013
<b>Pare-Pare</b>	70,59	70,64	14,44	14,45	10,01	10,02	12.817	12.966
<b>Palopo</b>	70,20	70,25	15,02	15,03	10,25	10,26	12.005	12.156
<b>SULSEL</b>	<b>69,80</b>	<b>69,82</b>	<b>12,99</b>	<b>13,16</b>	<b>7,64</b>	<b>7,75</b>	<b>9.992</b>	<b>10.281</b>
<b>Nasional</b>	<b>70,78</b>	<b>70,90</b>	<b>12,55</b>	<b>12,72</b>	<b>7,84</b>	<b>7,95</b>	<b>10.150</b>	<b>10.420</b>

Sumber : BPS Pinrang

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggungjawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Namun IPM nyatanya belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada Tahun 2015 di Kabupaten Pinrang IPM laki-laki 71,69 dan IPM perempuan 67,91. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki. IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80), sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang (antara 60 sampai dengan 70). Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan

memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun. Sejak tahun 2012, IPG sudah melebihi angka 90, dan di tahun 2015 nilainya sudah mencapai 94,73.

**Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015**

Kabupaten / Kota	2011	2012	2013	2014	2015		IPG
					IPM laki-laki	IPM Perempuan	
Kep, Selayar	89,78	90,76	91,16	91,37	68,95	63,31	91,82
Bulukumba	91,14	92,62	94,46	95,74	68,13	65,45	96,08
Bantaeng	96,24	96,56	96,62	96,86	66,85	64,43	96,38
Jeneponto	88,34	88,35	88,85	90,16	66,66	60,11	90,17
Takalar	82,45	84,06	85,57	86,91	68,63	59,97	87,37
Gowa	82,37	84,36	85,24	87,85	71,17	62,57	87,92
Sinjai	97,94	98,48	98,51	98,52	65,26	64,35	98,61
Maros	86,53	87,72	88,21	88,61	71,82	63,81	88,84
Pangkep	87,75	88,58	89,45	89,74	71,36	64,05	89,75
Barru	94,74	95,09	95,11	95,36	71,66	68,09	95,02
Bone	89,71	89,90	90,71	91,37	67,02	61,61	91,93
Soppeng	98,61	98,89	98,90	98,96	66,38	65,33	98,42
Wajo	87,51	88,07	88,28	88,86	72,28	64,40	89,10
Sidrap	89,59	90,27	90,46	91,50	73,16	66,95	91,51
<b>Pinrang</b>	<b>92,79</b>	<b>92,82</b>	<b>93,11</b>	<b>94,89</b>	<b>71,69</b>	<b>67,91</b>	<b>94,73</b>
Enrekang	96,75	97,09	98,00	98,08	70,72	69,27	97,95
Luwu	90,22	91,56	91,69	91,88	71,74	65,92	91,89
Tana Toraja	85,45	85,79	85,98	86,38	71,01	61,48	86,57
Luwu Utara	87,66	87,98	88,21	88,55	71,10	63,05	88,68
Luwu Timur	87,79	88,01	88,61	89,02	75,00	66,98	89,31
Toraja Utara	84,25	84,56	84,61	85,04	71,07	60,84	85,61
Kota Makasar	93,32	93,33	93,40	93,58	82,15	77,18	93,96
Kota Pare Pare	96,59	96,69	97,05	97,27	77,88	75,77	97,29
Kota Palopo	94,07	95,48	95,66	96,81	77,80	75,62	97,20
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>91,79</b>	<b>91,96</b>	<b>92,34</b>	<b>92,60</b>	<b>72,98</b>	<b>67,81</b>	<b>92,92</b>
<b>Nasional</b>	<b>89,52</b>	<b>90,07</b>	<b>90,19</b>	<b>90,34</b>	<b>73,58</b>	<b>66,98</b>	<b>91,03</b>

Sumber : BPS Pinrang

Capaian IPM yang tinggi tidak serta merta memberikan IPG yang tinggi. Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. IPG yang lebih tinggi

dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Hal ini terjadi pada kasus Kabupaten Sinjai yaitu IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten ini lebih rendah dibandingkan Kota Makassar, namun IPGnya lebih tinggi. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sinjai lebih kecil dibandingkan Kota Makassar.

Berbagai upaya untuk mendorong kapabilitas perempuan Indonesia di segala bidang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui produk-produk hukum yang lebih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi. Selain meningkatkan kemampuan dasar seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan juga memperjuangkan peningkatan jumlah peran perempuan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah membangun kerjasama antar kementerian dan menyusun anggaran yang responsif gender. Disamping itu untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di daerah, Pemerintah Daerah harus melaksanakannya sesuai amanat UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan sinergi yang baik antara program pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemberdayaan perempuan di Indonesia menjadi lebih nyata dan menyeluruh. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan Khususnya di Kabupaten Pinrang, maka pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi sangat penting.

**Tabel 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2015**

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015			IDG
			Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	
Kep, Selayar	59,61	59,67	16,00	62,59	31,55	62,75
Bulukumba	58,55	66,15	17,50	67,05	33,41	63,74
Bantaeng	75,69	78,41	32,00	52,75	35,75	79,24
Jeneponto	60,76	65,86	20,00	48,67	30,30	67,39
Takalar	63,84	62,75	26,67	56,16	27,25	68,87
Gowa	75,10	67,37	17,78	46,62	32,05	67,99
Sinjai	59,99	70,44	26,67	64,33	32,00	69,69
Maros	58,85	61,62	20,00	46,74	26,16	64,55
Pangkep	59,86	57,00	8,57	51,57	31,55	57,28
Barru	60,63	64,35	24,00	58,14	25,00	64,62
Bone	60,64	62,18	13,33	55,74	31,96	62,49
Soppeng	60,63	63,37	16,67	52,67	32,69	65,76
Wajo	59,44	59,98	17,50	62,15	25,85	59,72
Sidrap	52,97	48,43	2,86	49,67	29,03	49,16
<b>Pinrang</b>	<b>61,91</b>	<b>59,00</b>	<b>7,50</b>	<b>54,63</b>	<b>34,50</b>	<b>59,02</b>
Enrekang	61,40	57,89	6,67	54,16	35,38	58,59
Luwu	63,05	60,72	11,43	62,29	36,50	62,47
Tana Toraja	62,58	72,56	20,00	53,47	39,33	73,38
Luwu Utara	40,04	43,92	5,71	58,97	19,28	43,74
Luwu Timur	43,53	45,04	3,33	47,46	22,61	45,72
Toraja Utara	63,18	58,03	8,57	56,58	33,02	57,80
Kota Makasar	64,68	68,63	16,00	48,93	34,63	69,21
Kota Pare Pare	63,85	61,22	12,00	50,49	30,92	61,86
Kota Palopo	70,35	69,67	20,00	51,29	34,06	70,91
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>64,42</b>	<b>66,76</b>	<b>18,82</b>	<b>52,95</b>	<b>31,12</b>	<b>67,98</b>

Sumber : BPS Pinrang

IDG Kabupaten Pinrang tahun 2015 berada pada 59,02 persen atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat dari

komponen pembentuknya, peningkatan IDG Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dari 51,07 persen pada tahun 2014 menjadi 54,63 persen pada tahun 2015 dan persentase sumbangan pendapatan perempuan dari 34,43 pada tahun 2014 menjadi 34,50 pada tahun 2015. Sementara keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah berada di posisi 6,50 persen. Di antara ketiga variabel tersebut, capaian perempuan sebagai tenaga profesional merupakan yang tertinggi bahkan melawati capaian laki-laki. Artinya daya serap tenaga kerja profesional perempuan di Kabupaten Pinrang lebih baik dibandingkan laki-laki.

Hal yang lumrah terjadi di dunia jika pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk keranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). Oleh sebab itu peningkatan kapasitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan di semua bidang pembangunan.

Sektor pertanian masih memiliki sumbangan atau share paling besar pada PDRB Kabupaten Pinrang Tahun 2016 yaitu mencapai 48,67% terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menandakan semakin berkembangnya suatu daerah juga ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, baik pertumbuhan alami maupun pertumbuhan yang diakibatkan adanya laju migrasi manusia.

Lokasi yang strategis menyebabkan Kabupaten Pinrang dilirik sebagai tempat yang sangat cocok untuk bertempat tinggal, oleh karenanya kecenderungan bertambahnya jumlah penduduk tersebut mengakibatkan juga permintaan akan produk-produk hasil pertanian semakin meningkat pula. Terlebih lagi untuk komoditas tanaman pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Pinrang secara khusus.

Kekayaan SDM dan SDA Kabupaten Pinrang pada sektor pertanian diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lebih baik lagi, tetapi bukan hal mudah untuk mewujudkan itu semua dikarenakan banyak sekali tantangan yang dihadapi dewasa ini di Kabupaten Pinrang terutama ialah permasalahan diversifikasi lahan sawah yang dari hari ke hari makin tergerus oleh kemajuan teknologi seperti pembukaan lahan untuk perumahan dan alih lahan lainnya. Dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin besar juga permintaan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dan kondisi ini tidak diikuti dengan kemampuan penyediaan terhadap

pemenuhan kebutuhan. Dan tantangan lainnya adalah fenomena alam yang semakin tidak terduga terjadinya bencana alam serta serangan hama pertanian yang semakin meluas dan masiv semakin sulit untuk dielakan lagi.

### 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Pinrang Tahun 2011 – 2016



Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Di Kabupaten Pinrang saat ini memiliki produksi tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Melihat fakta laju pertumbuhan untuk sektor pertanian yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 pertumbuhannya tercatat 6,30 % dari tahun sebelumnya dan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 5,98 % dan 5,18 %. Namun di Tahun 2013 terjadi peningkatan laju pertumbuhan luar biasa yang mencapai angka 9,29 % yang diakibatkan terjadinya panen raya dan sedikit terjadi gagal panen/puso. Ironisnya

untuk kondisi di dua tahun terakhir yaitu Tahun 2015 dan 2016 justru kembali mengalami laju pertumbuhan yang melambat. Pada Tahun 2015 laju pertumbuhannya berada pada posisi 8,99% dan terus melambat pada tahun 2016 yang hanya mencapai 7,85%.

Berdasarkan fenomena data diatas maka perlu dilakukan upaya khusus guna mempercepat dan meningkatkan kembali produktivitas tanaman pertanian di Kabupaten Pinrang. Kendala-kendala pada sektor pertanian di Kabupaten Pinrang seperti bantuan penyaluran benih, pemberian alat modal pertanian/sarana produksi, penyaluran pupuk dan yang terpenting adalah harga gabah yang terkontrol sehingga bermuara pada kesejahteraan petani atau rumah tangga pertanian.

Tabel-tabel dibawah ini akan menampilkan angka tetap (ATAP) produksi tanaman pangan menurut Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan tahun 2015 dan 2016. Data ini bersumber dari laporan Survei Pertanian (SP) yang dikumpulkan setiap bulan yang merupakan kerjasama Kementerian Pertanian RI dan BPS.

**Tabel 4.1 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Padi Sawah + Ladang**

Kabupaten/Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Kep, Selayar	5.986	48,90	29.270	4.808	42,43	20.401
Bulukumba	36.408	53,17	193.585	42.562	48,60	206.866
Bantaeng	13.997	52,67	73.722	15.849	63,56	100.728
Jeneponto	21.434	48,48	103.903	23.795	44,33	105.491
Takalar	28.263	46,51	131.447	29.159	48,99	142.855
Gowa	61.362	48,94	300.304	65.418	49,32	322.627
Sinjai	22.734	56,65	128.777	24.815	47,18	117.079
Maros	64.202	54,70	351.169	57.904	54,22	313.972
Pangkep	29.948	50,94	152.564	28.911	51,56	149.070
Barru	19.793	56,47	111.773	21.604	51,01	110.206
Bone	171.163	47,49	812.775	176.509	50,30	887.862
Soppeng	38.868	58,26	226.433	50.823	55,23	280.702
Wajo	138.593	48,41	670.980	156.442	48,88	764.687
Sidrap	83.450	64,23	536.012	103.591	56,76	587.983
<b>Pinrang</b>	<b>101.534</b>	<b>64,51</b>	<b>655.017</b>	<b>103.504</b>	<b>58,83</b>	<b>608.923</b>
Enrekang	10.487	42,03	44.079	11.294	40,33	45.544
Luwu	63.023	48,93	308.380	69.635	44,86	312.382
Tana Toraja	23.020	44,43	102.267	22.580	50,12	113.178
Luwu Utara	39.358	45,75	180.063	40.304	38,82	156.475
Luwu Timur	37.648	55,59	209.271	41.507	48,19	200.039
Toraja Utara	23.392	44,26	103.545	28.586	45,85	131.058
Makassar	3.315	37,68	12.490	3.446	39,63	13.653
Pare-Pare	954	56,06	5.349	952	54,31	5.169
Palopo	5.098	56,16	28.631	5.128	58,76	30.129
<b>SULSEL</b>	<b>1.044.030</b>	<b>52,41</b>	<b>5.471.807</b>	<b>1.129.122</b>	<b>50,72</b>	<b>5.727.081</b>

Sumber : BPS Pinrang

**Tabel 4.2 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Jagung**

Kabupaten/Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Kep, Selayar	2.648	32,33	8.562	2.831	30,02	8.498
Bulukumba	26.642	38,59	102.824	25.756	42,26	108.850
Bantaeng	23.988	57,91	138.915	25.727	68,18	175.414
Jeneponto	47.955	56,53	271.074	52.010	48,84	254.009
Takalar	3.923	45,92	18.015	6.904	67,07	46.308
Gowa	41.445	54,07	224.079	44.799	61,49	275.461
Sinjai	3.217	41,47	13.340	4.502	54,36	24.473
Maros	1.256	43,66	5.483	9.830	51,08	50.212
Pangkep	684	52,10	3.564	1.182	51,72	6.114
Barru	496	54,06	2.682	994	57,58	5.721
Bone	51.657	56,33	290.960	66.688	61,53	410.317
Soppeng	10.546	39,00	41.127	19.141	48,66	93.131
Wajo	34.188	39,01	133.369	29.120	48,22	140.403
Sidrap	10.834	54,12	58.634	16.027	60,15	96.408
<b>Pinrang</b>	<b>12.479</b>	<b>66,65</b>	<b>83.169</b>	<b>20.794</b>	<b>66,37</b>	<b>138.017</b>
Enrekang	8.196	54,42	44.604	14.185	64,46	91.441
Luwu	2.232	46,63	10.408	6.440	53,00	34.126
Tana Toraja	854	59,71	5.099	2.148	60,51	12.998
Luwu Utara	6.392	56,80	36.309	11.555	51,86	59.927
Luwu Timur	3.596	68,84	24.755	3.716	51,16	19.012
Toraja Utara	715	63,81	4.562	707	47,02	3.324
Makassar	9	49,77	45	14	53,56	75
Pare-Pare	450	46,60	2.097	775	59,15	4.584
Palopo	713	66,44	4.737	928	67,92	6.303
<b>SULSEL</b>	<b>295.115</b>	<b>51,79</b>	<b>1.528.414</b>	<b>366.771</b>	<b>56,31</b>	<b>2.065.126</b>

Sumber : BPS Pinrang

**Tabel 4.3 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Kedelai**

Kabupaten/Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Kep, Selayar	-	-	-	-	-	-
Bulukumba	1.519	17,31	2.629	1.713	14,18	2.430
Bantaeng	99	12,,86	127	165	12,32	204
Jeneponto	1.438	13,94	2.005	1.589	14,73	2.341
Takalar	1.196	19,79	2.367	424	16,63	706
Gowa	5.303	13,78	7.310	471	12,42	585
Sinjai	-	-	-	1.536	14,54	2.233
Maros	2.913	14,75	4.298	2.457	11,69	2.873
Pangkep	719	11,92	857	816	15,28	1.247
Barru	-	-	-	69	12,32	86
Bone	15.896	18,49	29.398	30.591	13,27	40.598
Soppeng	2.430	20,36	4.947	1.501	16,63	2.497
Wajo	5.608	20,54	11.517	4.692	16,06	7.536
Sidrap	121	14,96	181	52	12,61	66
<b>Pinrang</b>	<b>398</b>	<b>22,13</b>	<b>881</b>	<b>93</b>	<b>14,75</b>	<b>138</b>
Enrekang	45	13,23	60	33	12,83	42
Luwu	140	18,81	263	11	14,89	16
Tana Toraja	142	17,29	246	235	18,74	440
Luwu Utara	3	18,09	5	5	14,65	7
Luwu Timur	33	17,78	59	4	14,37	6
Toraja Utara	14	13,43	19	2	11,82	2
Makassar	19	12,33	23	29	13,89	40
Pare-Pare	-	-	-	-	-	-
Palopo	-	-	-	-	-	-
<b>SULSEL</b>	<b>38.036</b>	<b>17,67</b>	<b>67.192</b>	<b>46.489</b>	<b>13,35</b>	<b>62.054</b>

Sumber : BPS Pinrang

**Tabel 4.4 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Kacang Tanah**

Kabupaten/ Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Selayar	563	10,55	594	516	9,67	499
Bulukumba	1.871	12,02	2.248	1.695	10,44	1.770
Bantaeng	112	15,25	171	1.218	14,42	1.756
Jeneponto	153	9,98	153	474	10,73	509
Takalar	14	11,09	16	23	11,81	27
Gowa	402	10,94	440	706	13,70	967
Sinjai	1.259	10,57	1.331	853	12,60	1.075
Maros	796	14,11	1.123	1.021	14,27	1.457
Pangkep	994	15,80	1.571	924	14,54	1.343
Barru	2.305	11,37	2.621	2.243	14,96	3.355
Bone	9.076	7,34	6.665	7.646	15,63	11.949
Soppeng	307	13,21	406	541	16,63	900
Wajo	507	13,34	676	1.700	16,40	2.788
Sidrap	124	13,21	164	92	16,85	156
<b>Pinrang</b>	<b>68</b>	<b>9,24</b>	<b>63</b>	<b>40</b>	<b>19,66</b>	<b>79</b>
Enrekang	221	9,37	207	258	12,51	322
Luwu	35	13,60	48	38	15,62	59
Tana Toraja	104	17,00	177	74	12,52	93
Luwu Utara	144	12,03	173	72	15,08	108
Luwu Timur	26	13,47	35	15	14,58	22
Toraja Utara	42	15,05	63	4	13,38	5
Makassar	-	-	-	-	-	-
Pare-Pare	80	10,07	81	150	10,98	165
Palopo	-	-	-	-	-	-
<b>Sulsel</b>	<b>19.203</b>	<b>9,91</b>	<b>19.024</b>	<b>20.302</b>	<b>14,48</b>	<b>29.404</b>

Sumber : BPS Pinrang

**Tabel 4.5 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Kacang Hijau**

Kabupaten/ Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Selayar	163	11,49	187	471	16,93	797
Bulukumba	2.434	14,34	3.491	81	15,32	125
Bantaeng	5	11,81	6	77	11,56	89
Jeneponto	3.326	12,08	4.019	3.542	12,87	4.559
Takalar	2.211	14,04	3.104	1.234	10,97	1.353
Gowa	4.316	13,45	5.805	5.522	12,40	6.848
Sinjai	-	-	-	-	-	-
Maros	525	12,83	674	535	12,54	671
Pangkep	264	13,26	350	609	11,93	727
Barru	8	14,02	11	15	13,90	20
Bone	1.041	12,51	1.302	1.175	9,25	1.086
Soppeng	238	13,80	329	108	9,36	101
Wajo	16.624	12,53	20.824	16.727	9,99	16.714
Sidrap	251	14,18	356	108	9,29	101
<b>Pinrang</b>	<b>43</b>	<b>14,71</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>12,95</b>	<b>38</b>
Enrekang	26	12,51	33	16	8,38	13
Luwu	35	14,24	50	35	9,84	34
Tana Toraja	-	-	-	2	12,32	2
Luwu Utara	106	12,87	136	110	11,32	124
Luwu Timur	19	13,98	27	3	12,16	4
Toraja Utara	-	-	-	-	-	-
Makassar	9	11,98	11	16	10,98	17
Pare-Pare	9	11,08	10	22	16,62	37
Palopo	-	-	-	-	-	-
<b>Sulsel</b>	<b>31.653</b>	<b>12,89</b>	<b>40.787</b>	<b>30.435</b>	<b>10,99</b>	<b>33.461</b>

Sumber : BPS Pinrang

**Tabel 4.6 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Ubi Kayu**

Kabupaten/ Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Selayar	499	210,37	10.498	351	168,57	5.917
Bulukumba	422	226,77	9.570	60	187,88	1.127
Bantaeng	55	167,68	922	26	180,80	470
Jeneponto	6.528	202,12	131.941	3.501	233,87	81.878
Takalar	218	208,10	4.537	324	231,18	7.488
Gowa	14.775	214,75	317.293	8.222	272,33	223.901
Sinjai	96	245,16	2.354	31	164,38	508
Maros	1.359	157,81	21.447	1.468	328,97	48.286
Pangkep	144	225,48	3.247	106	163,87	1.737
Barru	330	221,48	7.309	249	382,03	9.513
Bone	372	262,31	9.758	289	187,94	5.430
Soppeng	9	257,16	231	13	221,14	287
Wajo	369	290,27	10.711	221	255,38	5.644
Sidrap	65	247,59	1.609	73	202,21	1.476
<b>Pinrang</b>	<b>363</b>	<b>249,44</b>	<b>9.055</b>	<b>260</b>	<b>220,67</b>	<b>5.737</b>
Enrekang	198	296,13	5.863	161	176,69	2.845
Luwu	110	168,73	1.856	104	187,18	1.947
Tana Toraja	339	184,20	6.244	184	214,28	3.943
Luwu Utara	231	260,60	6.020	134	180,65	2.417
Luwu Timur	71	161,91	1.150	71	183,95	1.306
Toraja Utara	183	193,43	3.540	224	179,95	4.031
Makassar	27	170,81	461	23	184,21	424
Pare-Pare	12	137,90	165	13	186,10	242
Palopo	8	221,37	177	-	-	-
<b>Sulsel</b>	<b>26.783</b>	<b>211,31</b>	<b>565.958</b>	<b>16.107</b>	<b>258,62</b>	<b>416.553</b>

Sumber : BPS Pinrang

**Tabel 4.7 Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan 2016 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Jenis Tanaman : Ubi Jalar**

Kabupaten/ Kota	2015			2016		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Selayar	155	127,20	1.972	106	127,49	1.351
Bulukumba	102	109,51	1.117	83	135,92	1.123
Bantaeng	83	124,86	1.036	55	161,40	888
Jeneponto	127	138,05	1.753	386	188,85	7.290
Takalar	366	157,44	5.762	301	146,66	4.419
Gowa	415	145,38	6.033	401	172,41	6.917
Sinjai	192	120,58	2.315	202	117,44	2.371
Maros	290	159,04	4.612	462	196,86	9.089
Pangkep	87	166,94	1.452	52	151,31	781
Barru	209	158,69	3.317	158	226,35	3.576
Bone	1.349	160,63	21.668	1.120	134,53	15.067
Soppeng	7	176,15	123	4	183,29	73
Wajo	210	156,90	3.295	127	143,43	1.817
Sidrap	3	141,08	42	1	177,32	18
<b>Pinrang</b>	<b>90</b>	<b>160,15</b>	<b>1.441</b>	<b>93</b>	<b>161,18</b>	<b>1.499</b>
Enrekang	239	155,58	3.718	279	227,66	6.345
Luwu	122	109,80	1.340	76	117,10	890
Tana Toraja	211	140,91	2.973	127	137,97	1.752
Luwu Utara	210	180,97	3.800	90	173,37	1.555
Luwu Timur	54	172,63	932	60	196,86	1.181
Toraja Utara	175	155,16	2.715	243	135,28	3.287
Makassar	18	126,60	228	9	119,87	108
Pare-Pare	2	104,77	21	-	-	-
Palopo	1	134,34	13	-	-	-
<b>Sulsel</b>	<b>4.717</b>	<b>151,96</b>	<b>71.681</b>	<b>4.433</b>	<b>161,04</b>	<b>71.398</b>

Sumber : BPS Pinrang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan berpotensi meningkatkan juga jumlah permasalahan kependudukan salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran timbul karena terjadi kesenjangan antara SDM dengan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran akan semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Perlu disadari semua pihak bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Oleh karenanya BPS konsisten sejak tahun 1984 menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yang data utamanya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi.

Salah satu pendekatan untuk mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin adalah dengan pendekatan kebutuhan dasar. Dalam menghitung angka kemiskinan melalui komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun

1998 pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS telah dilakukan penyempurnaan, yaitu jumlah komponen kebutuhan dasar terdiri atas 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah perdesaan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 5.1 Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2016**

Dimensi Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Miskin (000)	28,1	32,1	29,92	30,51	31,28
Persentase Penduduk Miskin	7,83	8,86	8,20	8,34	8,48
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	207.073	221.717	228.150	234.897	250.163

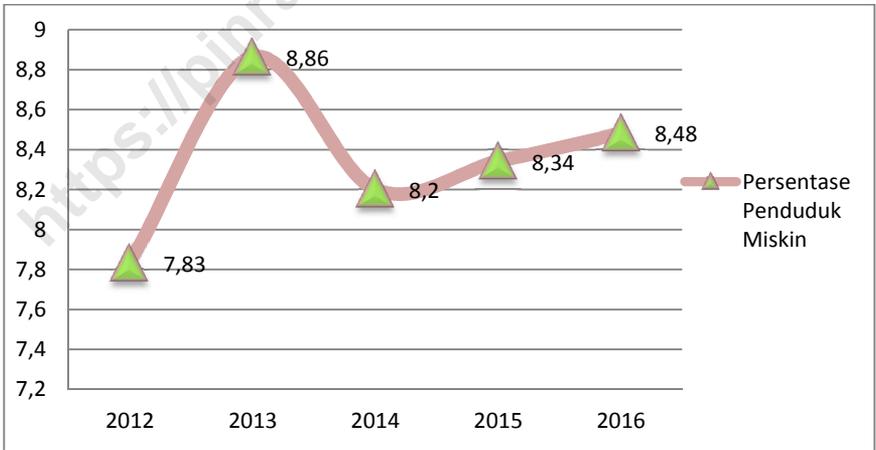
Sumber : BPS Pinrang

Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang pada periode tahun 2012-2016 ditunjukkan pada tabel 5.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada periode 2013-2014 terlihat adanya tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2013-2014 adalah sebesar 2,18 ribu jiwa, yaitu 32,1 ribu jiwa pada tahun 2013 menjadi 29,92 ribu jiwa tahun 2014.

Kemudian pada tahun berikutnya 2014-2016 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif yaitu masing-masing menjadi 30,51 ribu jiwa atau 8,34 persen (tahun 2015) dan 31,28 ribu jiwa atau 8,48 persen (tahun 2016). Menjamurnya teknologi online baik dari sektor perdagangan, teknologi informasi, maupun jasa-jasa diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016. Dikarenakan perubahan proses penciptaan barang dan jasa yang awalnya membutuhkan banyak tenaga kerja secara konvensional, tetapi semenjak 'online' merebak sedikit demi sedikit penggunaan tenaga kerja pada sektor-sektor yang disebut diatas semakin tergerus pula. Inilah yang memungkinkan semakin tingginya pengangguran yang berdampak pada jumlah penduduk miskin.

**5.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2016**



Sumber : BPS Pinrang

Beberapa indikator tentang tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 5.2 dibawah ini yang menampilkan tren tingkat kemiskinan antara kondisi Tahun 2015 dan

2016. Serta menampilkan Analisis mengenai garis kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan (p1) dan keparahan kemiskinan (p2).

**Tabek 5.2 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2016**

Kabupaten/ Kota	2015				2016			
	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Jumlah (ribu)	%	P1	P2
Selayar	16,90	12,94	2,24	0,54	17,21	13,11	9,40	0,65
Bulukumba	33,36	8,15	1,22	0,26	33,25	8,06	1,72	0,52
Bantaeng	17,55	9,53	1,30	0,26	17,53	9,51	1,78	0,59
Jeneponto	53,87	15,18	3,21	1,01	55,32	15,49	3,25	0,96
Takalar	27,12	9,48	1,38	0,34	27,05	9,35	1,34	0,35
Gowa	59,47	8,27	1,56	0,46	61,52	8,40	1,59	0,47
Sinjai	21,99	9,26	1,67	0,46	22,51	9,41	1,66	0,43
Maros	40,88	11,85	2,31	0,69	39,02	11,41	2,46	0,79
Pangkep	53,85	16,70	3,59	1,11	52,86	16,22	3,11	0,97
Barru	16,10	9,42	1,55	0,37	16,24	9,45	1,71	0,52
Bone	75,01	10,12	1,73	0,40	75,09	10,07	1,51	0,31
Soppeng	18,88	8,36	0,98	0,19	19,12	8,45	1,73	0,50
Wajo	30,88	7,66	1,18	0,32	29,46	7,47	1,12	0,30
Sidrap	16,03	5,55	0,66	0,13	15,92	5,45	0,98	0,24
<b>Pinrang</b>	<b>30,51</b>	<b>8,34</b>	<b>1,66</b>	<b>0,52</b>	<b>31,28</b>	<b>8,48</b>	<b>1,30</b>	<b>0,36</b>
Enrekang	27,60	13,82	2,11	0,52	26,98	13,41	2,32	0,64
Luwu	48,64	13,89	2,54	0,69	50,58	14,35	2,32	0,61
Tator	28,59	12,46	2,69	0,91	28,42	12,36	2,65	0,98
Lutra	41,89	13,87	2,83	0,80	43,75	14,36	2,29	0,60
Lutim	19,67	7,18	1,28	0,35	21,08	7,52	1,09	0,23
Toraja utara	34,37	15,19	1,87	0,39	33,02	14,57	3,76	1,34
Makassar	63,24	4,38	0,60	0,12	66,78	4,56	0,67	0,16
Pare-pare	8,41	6,08	0,81	0,16	8,02	5,73	0,82	0,19
Palopo	14,51	8,58	1,76	0,52	15,02	8,74	1,17	0,28
<b>SULSEL</b>	<b>797,72</b>	<b>9,39</b>	<b>1,69</b>	<b>0,45</b>	<b>807,03</b>	<b>9,40</b>	<b>1,83</b>	<b>0,55</b>

Sumber : BPS Pinrang

Garis kemiskinan pada tahun 2012 - 2016 terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 43.090,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 207.073,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 250.163,- pada tahun 2016.

Masalah kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah maupun persentase penduduk miskin, akan tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode tahun 2015-2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pinrang menurun dari 1,66 pada keadaan tahun 2015 menjadi 1,30 pada keadaan tahun 2016. Dapat diartikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan (kesenjangan/ketimpangan) pada tahun 2016 relatif lebih baik bila dibandingkan dengan pada tahun 2015.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selaras dengan hal tersebut diatas Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,52 (tahun 2015) menjadi 0,36 (tahun 2016). Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2016 memiliki ketimpangan yang lebih rendah dibanding tahun 2015.

BPS Kabupaten Pinrang, 2016. Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010-2020. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

\_\_\_\_\_. Indikator Sosial ekonomi Makro Kabupaten Pinrang 2016. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

BPS Kabupaten Pinrang, 2017. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pinrang Menurut Pengeluaran 2012-2016. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

\_\_\_\_\_. Statistik Tanaman Holtikultura Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

\_\_\_\_\_. Luas Panen dan Luas Tanam Palawija Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

\_\_\_\_\_. Luas Panen dan Luas Tanam Padi Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang

Badan Pusat Statistik (BPS), 2016. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2020. Jakarta : Badan Pusat Statistik

\_\_\_\_\_. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. Jakarta : Badan Pusat Statistik

BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017. Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 2 2017. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

\_\_\_\_\_. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2012-2016. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

\_\_\_\_\_. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se - Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2016. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<https://pinrangkab.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PINRANG

JL. Andi Isa No. 18, Pinrang, Sulawesi Selatan, 91211

Telp./Fax : (0421) 921021

E-Mail : [bps7315@bps.go.id](mailto:bps7315@bps.go.id)

Homepage : [pinrangkab.bps.go.id](http://pinrangkab.bps.go.id)